

**EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DESA
DALAM MENGALOKASIKAN DANA DESA
MENURUT PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Ilmu Ekonomi Syariah**

Oleh:

**DORA PRIMAPURNAMA BELAYA
NPM. 1551010169
Jurusan : EKONOMI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019**

**EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DESA
DALAM MENGALOKASIKAN DANA DESA
PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Ilmu Ekonomi Syariah**

Oleh:

**DORA PRIMAPURNAMA BELAYA
NPM.1551010169**

Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I : Any Eliza, S.E., M.Ak.

Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H / 2019 M**

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum. segala sesuatu yang berhubungan dengan Negara diatur oleh peraturan perundang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Negara Indonesia terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan oleh pemerintahan dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bentuk wilayah pemerintahan tersebut adalah kecamatan, kelurahan dan desa yang terletak di wilayah pemerintahannya Kabupaten atau kota-kota. Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, *Pertama*, Bagaimana Peran Pemerintah Desa yang efektif dalam Pengalokasian Dana Desa ? *kedua*, Apakah Peran Pemerintah Desa telah Mengalokasikan Dana Desa (ADD) telah efektif ? *ketiga*, Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Pengalokasian Dana Desa (ADD) ? *keempat*, Bagaimana Peran Pemerintah Desa yang efektif dalam Pengalokasian Dana Desa Persepektif Ekonomi Islam ? Tujuan adanya penelitian ini yang *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam Pengalokasian Dana Desa. *Kedua*, untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa yang efektif dalam Pengalokasian Dana Desa (ADD). *Ketiga*, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Pengalokasian Dana Desa (ADD). *Keempat*, serta untuk mengetahui Pemerintah Desa yang efektif dalam mengalokasikan Dana Desa Persepektif Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yang dimana penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data berupa Insidental Sampling, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data, pemeriksaan data dan penandaan data. Setelah data terkumpul peneliti menganalisa dalam metode-metode berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dapat disimpulkan *pertama*, Peran Pemerintah Desa Dalam Pengalokasian Dana Desa Surabaya Ilir melalui tiga tahap yaitu, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. *Kedua*, Peran Pemerintah Desa Surabaya Ilir, kurang efektif dalam hal Transparansi Dana Desa, Akuntabel dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa, Partisipatif dari Masyarakat Desa Surabaya Ilir, serta Disiplin dan Tertib Anggaran dalam Pengalokasian Dana Desa (ADD). *Ketiga*, faktor pendukung dalam Pengalokasian Dana Desa adalah Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dan faktor penghambat dalam Pengalokasian Dana Desa adalah SDM, informasi dan partisipasi Masyarakat. *Keempat*, Peran Pemerintah Desa dalam Persepektif Ekonomi Islam, Pemerintah mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum dan keadilan , serta mempunyai fungsi dalam mengelola pemberian Allah Swt.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Ekonomi Islam

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dora Prima Purnama Belaya
NPM : 1551010169
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dan Desa (Studi Pada Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 9 September 2019
Penulis,

Dora Prima Purnama Belaya
1551010169



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame – Bandar Lampung Ilp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “ Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa Persepektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah) “

Nama : Dora Prima Purnama Belaya

NPM : 1551010169

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI,

untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Any Eliza, S.E., M.Ak
NIP.198308152006042004

Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy
NIP.

Ketua Jurusan,

Madnasir, S.E., M.Si
NIP.197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame – Bandar Lampung tlp. (0721) 7032600

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa Persepektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”** disusun oleh **Dora Prima Purnama Belaya NPM 1551010169** Program Studi **Ekonomi Syariah**, telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019.

TIM PENGUJI

Ketua : A. Zuliansyah, S.Si., M.M

Sekretaris : Dedi Satriawan, M.Pd

Penguji I : Fatih Fuadi, S.E.I., M.Si

Penguji II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.Si.
NIP.198008012003121001

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya :

“Hai Orang-Orang Yang Beriman, Janganlah Kamu Mengkhianati Allah Dan Rasul (Muhammad) Dan (Juga) Janganlah Kamu Mengkhianati Amanat-Amanat Yang Dipercayakan Kepadamu, Sedang Kamu Mengetahui” (Q.S Al-Anfaal:8:27)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Q.S : Al-Anfaal (8) Ayat 27* Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2015

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas hidayah-Nya, Skripsi ini penulis persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Syamsul Rijal dan Ibu Heni Purnama yang telah ikhlas mengasahi dan menyayangi serta mendidiku. Terimakasih atas bantuan, dukungan serta kasih sayang yang begitu besar serta do'a yang tiada henti untuk anak mu, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penelitian ini.
2. Adik-adik saya Ernando Darma Wicaksana dan Muhammad Ikhsan Wicaksana, terimakasih telah memberikan motivasi, semangat dan do'a.
3. Untuk Sahabat Terbaikku yang selalu memberikan semangat, do'a, dukungannya dan inspirasinya selama ini Billi Firmansyah, Rista, Meme, Elsa, Anggi, Widia, Mul, Fidey, Chintia, Sari, Ani, Nita, Dika, Muas Andre.
4. Untuk Teman-teman Ekonomi Islam Kelas A angkatan 2015 tanpa terkecuali, terimakasih atas kebersamaan, persahabatan serta kekeluargaan, teru berkarya dan berprestasi.
5. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menjadi sarana menimba Ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dora Prima Purnama Belaya, dilahirkan di Surabaya Ilir pada tanggal 15 April 1997, anak pertama dari pasangan Syamsul Rijal dan Heni Purnama. Pendidikan dimulai dari TK Aisyah Surabaya Ilir, selesai pada tahun 2006, SD N 1 Surabaya Ilir, selesai pada tahun 2009, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Tengah 2009, Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung 2015, dan sedang melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2015.

Bandar Lampung, 26 Agustus 2019

Dora Prima Purnama Belaya
NPM. 1551010169

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan Islam dan Ikhsan serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga skripsi dengan judul “Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dan Desa Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)” dapat diselesaikan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing I dan Ibu Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini selesai.
4. Segenap Bapak/Ibu dosen dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kontribusi dalam mendapatkan materi-materi selama ini, guna menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh staff akademika dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data, dan lain-lain.
6. Almamater ku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman yang begitu berharga.
7. Segenap Aparatur Desa serta Masyarakat Desa Surabaya Ilir yang telah memberikan kontribusi dalam mendapatkan informasi-informasi sehingga terselesaikan skripsi ini.

Semoga jerih payah dan amal Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 26 Agustus 2019

Dora Prima Purnama Belaya
NPM. 1551010169

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
.....	xi
v	
DAFTAR TABEL	xv
.....	xv
i	
DAFTAR LAMPIRAN	xi
.....	xi
vii	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
1. Alasan Objektif.....	4
2. Alasan Subjektif.....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Batasan dan Rumusan Masalah	12
1. Batasan Masalah	12
2. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	13
F. Metodologi Penelitian	14
1. Metode Jenis dan Sifat Penelitian.....	14
2. Lokasi Penelitian.....	15
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	15
4. Populasi dan Sempel Penelitian.....	16
5. Sumber Data	17

6. Metode Pengumpulan Data	17
7. Pengelola Data	19
8. Metode Analisa Data	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Efektivitas.....	21
B. Alokasi Dana Desa (ADD).....	23
1. Pengertian Alokasi Dana Desa.....	24
2. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa	26
.....	
3. Maksud, Tujuan, dan Sasaran ADD.....	29
.....	
C. Peran pemerintah Desa Dan Mengalokasikan Dana Desa	34
1. Pengertian Peran	35
2. Pengertian Desa.....	37
3. Dana Desa Menurut Peraturan	39
4. Otonomi Desa	39
5. Tugas, Hak, dan Wewenang Pemerintah Desa	40
6. Fungsi Pemerintah Desa	43
D. Peran Pemerintah Desa Dalam Ekonomi Islam.....	44

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa.....	47
1. Sejarah singkat beriddirinya Desa Surabaya Ilir.....	47
2. Visi Misi Desa Surabaya Ilir.....	
3. Kondisi Geografis Desa Surabaya Ilir.....	48
4. Agama penduduk Desa Surabaya Ilir.....	51
B. Struktur Perangkat Desa Surabaya Ilir.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa (ADD) Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah	59
B. Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa (ADD) Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.....	70
C. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah	74
D. Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa (ADD) Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Persepektif Ekonomi Islam.....	80

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	51
Gambar 3.1 Struktur Perangkat Desa Surabaya Ilir	58

DAFTAR TABEL

4.1 Tahapan Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Kegiatan Musrembang.....	66
4.2 Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2017	68
4.3 Penilaian Terhadap Pertanggung Jawaban Pengelolaan ADD	72

DAFTAR LAMPIRAN

- 4.3.1 Daftar Pertanyaan Wawancara
- 4.3.2 Dokumentasi
- 4.3.3 Izin Riset
- 4.3.4 Kartu Konsultasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dengan tujuan mepertegas pokok pembahasan agar mendapatkan gambaran yang jelas dalam mengambil arti dan maksud atau istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan dalam judul **“Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”** Maka terlebih dahulu dijelaskan beberapa istilah-istilah penting yang terkandung di dalam judul tersebut:

1. **Efektivitas** adalah segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau organisasi yangbertujuan untuk mencapai sasaran atau target yang ingin di capai dalam bentuk hasil yang telah di tentukan sebelumnya, dengan kata lain efektifitas adalah langkah langkah atau metode yang telah ditetapkan.¹
2. **Peran** adalah rangkaian perilaku atau tindakan yang harus dimainkan sesuai dengan situasi sosial baik dia formal dan informal.

¹Murni Siswanti, *“Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”*, (Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), h. 26.

3. Pemerintah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat². Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lainnya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, desa telah memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur seluruh tatanan di desa, termasuk menyusun anggaran ataupun menyusun keuangan desa sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.

4. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa³.

² H.A.W Widjaja, *Otonom Desa Merupakan Otonom yag Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 3.

³ Kementrian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, (Jakarta : Kemenkeu, 2017), h. 7.

5. Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu, yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.⁴

6. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai Al-Qur'an dan Sunnah.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwasannya Efektifitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa (ADD) sangatlah penting guna menunjang Pembangunan Desa serta keefesiensinya Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Dana Desa tersebut. Kata kunci di penelitian ini adalah Peran Pemerintah Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dalam Mengelola Dana Desa (ADD).

B. Alasan Memilih Judul

a. Alasan Objektif

Alokasi Dana Desa perlu dialokasikan secara efektif karena Alokasi dana desa merupakan salah satu sumber keuangan desa dari beberapa sumber keuangan desa, dalam penerapannya, Alokasi Dana Desa diperuntukkan dalam menunjang pemerintah desa untuk menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan desa. Alokasi dana desa di kerjakan oleh pemerintah desa itu sendiri, kinerja

⁴*Ibid.* h. 250

⁵ Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 29

pemerintah desa sangat penting dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

Desa Surabaya Ilir merupakan Desa yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah yang telah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sejak tahun 2015. Namun Pengalokasian Dana Desa tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Desa belum sepenuhnya terealisasi untuk desa Surabaya Ilir.

b. Alasan Subjektif

Permasalahan ini cukup menarik bagi penulis, Memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa. Judul yang peneliti ajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari pada saat ini yaitu Ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Peneliti optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan benar.

C. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum. segala sesuatu yang berhubungan dengan Negara diatur oleh peraturan perundang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Negara Indonesia terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan oleh pemerintahan dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bentuk wilayah pemerintahan tersebut adalah kecamatan, kelurahan dan desa yang terletak di wilayah pemerintahannya Kabupaten atau kota-kota.

Desa Adalah nama lain yang dimana ada kesatuan masyarakat hukum atau yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Desa terdapat berbagai sumber pendapatan desa. Khususnya menyangkut Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf (d) bahwa alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.⁶

Penegasan lain dalam undang-undang yang mengatur dana desa yang diatur dalam Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa.

⁶ UUD Negara RI 1945 Pasal 18 ayat (1) Bahwa Negara Kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang di atur dalam undang-undang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diterima Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Setiap tahun anggaran pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBN untuk dialokasikan sebagai ADD pada setiap desa yang ada di Negara Indonesia.

Khususnya Kabupaten Lampung Tengah, merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung, yang juga memiliki 310 desa yang tersebar di 28 Kecamatan. Pengelolaan ADD tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas Sumber Daya manusia pemerintah daerah agar penggunaan ADD tersebut tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan ataupun menyalahi kewenangan yang ada sehingga mengarah kepada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penelitian terhadap penggunaan ADD di Kabupaten Lampung Tengah perlu dilakukan sebagai bagian dari penemuan permasalahan dan pemecahan permasalahan penggunaan ADD yang selama ini banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat desa, setidaknya terdapat berbagai kritikan oleh masyarakat desa kepada aparat desa dalam hal penggunaan ADD di desa Surabaya Ilir yang ada di Kabupaten Lampung Tengah hal ini dapat disimak dalam berbagai media surat kabar lokal yang ada di kabupaten Lampung Tengah, Khususnya dalam penelitian ini akan di fokuskan pada implementasi ADD pada satu desa di kecamatan Bandar Surabaya yang menurut penulis sangat representatif untuk dijadikan fokus penelitian karena Kecamatan Bandar Surabaya memiliki potensi wilayah yang cukup potensial dalam hal

perwisata dan sumber daya alam disisi lain alokasi ADD di desa yang ada di kecamatan Bandar Surabaya yang rata-rata hampir 1 milyar lebih pertahunnya dan akan dikelola oleh desa yang secara faktual masih memiliki keterbatasan kemampuan pengelolaan keuangan dari tingkat Sumber Daya Manusia. Adapun Desa yang akan menjadi wilayah penelitian dalam penggunaan ADD adalah Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

Dasar hukum Alokasi Dana Desa yaitu Undang-undang 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Pasal 81 Dan 82), Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Keuangan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Alokasi dana desa di desa Surabaya Ilir lebih banyak diperuntukkan membiayai bidang pemerintahan desa yang meliputi penghasilan tetap dan tunjangan, operasional perkantoran, serta gaji insentif para pemerintah desa Surabaya Ilir.⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan desa, dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk

⁷Hasil Wawancara dengan Pemerintah Desa Surabaya Ilir, 17 Maret 2019

melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka harus di pahami juga bahwa desa juga sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut termasuk juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.⁸

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari Dana Desa antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa.
2. Menuntaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian Desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan.
5. Memperkuat masyarakat dana sebagai subjek pembangunan.⁹

Pengalokasian Dana Desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dapat menggerakkan roda perekonomian Desa, maka pembangunan Desa akan meningkat sejahtera.

⁸Abu Rahum, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", (eJournal Ilmu Pemerintahan : 3 (4) 1623-1636 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2015), h. 2.

⁹*Ibid*, h. 7.

Desa Surabaya Ilir merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Setiap Desa dipastikan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah yang disebut Dana Desa. Menurut masyarakat Desa Surabaya Ilir mereka mengatakan bahwa belum terlihat secara spesifik adanya pembangunan seperti perbaikan jalan desa yang berulabang parah disepanjang desa, pembangunan gorong-gorong atau drainase dan juga belum ada perbaikan pasar yang sekarang pasar di Desa Surabaya Ilir hampir mati dikarenakan pasar buka hanya di hari senin, rabu, jumat dan sabtu. Keamana dan ketertiban di Desa Surabaya Ilir ini belum termasuk dikatakan desa yang aman dan tentram. Berbeda dengan desa tetangga yang sudah terlihat adanya perubahan pada pembangunan fisik terhadap desa tersebut.¹⁰ Hal ini membuktikan bahwa kurang sesuai atau adanya kesenjangan teori Dana Desa yaitu tujuan Alokasi Dana Desa yang berbunyi “Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa” terhadap fenomena nyata yang ada di Desa Surabaya Ilir.

Secara umum tugas dan fungsi pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa adalah sebagai berikut :

- a. Tugas dan wewenang pemerintah desa dapat di kelompokkan dalam berbagai cara. misal, pembedangan, pertanian, pengkreditan, pengairan, perindustrian, agama, kebudayaan, dan olahraga. Selain itu, di bagi juga dalam pembagian tugas rutin dan tugas sewaktu-waktu, atau sesuai dengan asas yang di terapkan dalam penyelenggaraan

¹⁰ Hasil Observasi pada tanggal 16 Maret 2019

pemerintah di daerah yang di golongan dalam tugas-tugas menurut desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas bantuan.pemerintah desa juga tugas menyelenggarakan atau melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Fungsi pemerintah Desa adalah menyelenggarakan seperti tata praja pemerintahan, penetapan pertaturan di desa pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Pemerintah desa melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasana pendesaan dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan. Pemerintah Desa mengsosialisasikan dan memotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,lingkungan hidup pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.pemerintah desa juga menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Serta tugas pemerintahan desa yang lain di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

Indikator peran pemerintah yang efektif dalam mengelola Alokasi Dana Desa adalah yang tercantum pada peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “*keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, transparan,*

¹¹ Rusyan Tabrani, *Membangun efektivitas kinerja kepala desa*, (Jakarta: bumi aksara,2018) h.70

*akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*¹²”

Salah satu pentingnya efektivitas dalam islam perlunya di terapkan adalah dengan adanya efektivitas kaum muslimin bisa mengatur perbelanjaannya dengan perhitungan yang secermat cermatnya, agar apa yang dibelanjakan sesuai dan tepat dengan keperluannya. Tidak boleh membelanjakan harta kepada orang yang yang tidak berhak menerimanya,atau memberikan harta melebihi dari yang seharusnya. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep efektivitas dalam kitab suci Al-qur'an Q.S. Al-Isra' ayat 26 :

﴿تَبْذِيرًا تَبْذِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ لَا تَرْجِعُونَهُنَّ إِلَى الْبُيُوتِ أَنْ يَضْحَكُوا عَلَيْكُمْ﴾

*Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan,dan janganlah menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”(QS. Al-Isra : 26)*¹³

Berdasarkan ayat Al-Isra' ayat 26 yang menyebutkan bahwa janganlah menghambur hamburkan (hartamu) secara boros.Sejalan dengan teori efektivitas yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas

¹²Peraturan Menteri Dalam Negeri, tentang pengelolaan keuangan desa,Nomor 13 Tahun 2014.

¹³Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S : Al-Isra' (17) ayat 26*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 284.

jasa kegiatan yang dijalankan. Sehingga dengan efektivitas maka seseorang mampu memanfaatkan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Ayat ini ditujukan kepada para penguasa atau orang yang berada pada kedudukan untuk lebih bisa mengefektivitaskan segala sesuatu tersebut.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Efektivitas Peran Pemerintah Dalam Mengalokasi Dana Desa (Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah”.

D. Fokus Masalah

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti Peran Pemerintah Dalam Mengalokasikan dan Desa (ADD) di Desa Surabaya ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017.

E. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang yang tertulis diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Apakah Peran Pemerintah Desa dalam Mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah telah berjalan (ADD) efektif?

3. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya kabupaten Lampung tengah ?
4. Bagaimana peran pemerintah desa dalam menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Persepektif Ekonomi Islam ?

F. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam efektivitas mengalokasikan Dana Desa (ADD) Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui efektivitas Peran Pemerintah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas mengalokasi Dana Desa (ADD) Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
- d. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam efektivitas mengalokasikan Dana Desa (ADD) Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten lampung Tengah Persepektif Ekonomi Islam.

G. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan memperoleh hasil yang di harapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak-

pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoristis

penelitian ini berguna untuk mengembangkan kegunaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, khususnya untuk pemerintahan desa yang berada di Desa Surabaya Ilir serta mengetahui bagian-bagian penting didalam mengembangkan Alokasi Dana Desa tersebut.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa Surabaya Ilir

- a. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran dan informasi yang dijadikan pertimbangan untuk mengoptimalkan peran pemerintah desa yang berada di desa Surabaya Ilir sehingga dapat bermanfaat untuk semua pihak yang berada di desa Surabaya Ilir tersebut.
- b. Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan dan menciptakan peranan pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa di desa Surabaya Ilir.

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan dan menciptakan peranan pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa di desa Surabaya Ilir.

2. Bagi Masyarakat Desa Surabaya Ilir

Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat di desa Surabaya Ilir sebagai acuan bagaimana semestinya Alokasi Dana Desa tersebut terealisasi untuk di desa Suabaya Ilir.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Peneleti ini menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. metode kalitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk penelitan pada objek yang alamiah.¹⁴

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan inteksi sosial individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, deskriptif berupaya untuk memperoleh upaya deskripsi yang lengkap dan akurat dari suaru situasi.¹⁶ Berdasarkan hasil observasi yang dideskripsikan adalah Peran Pemerintah Desa dalam Pengalokasian Dana Desa yang efektif dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Pengalokasian

¹⁴ Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2016), H.9.

¹⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2004), H. 4.

¹⁶ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* Edisi 4, (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2013), H.12

Dana Desa serta mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam Pengalokasian Dana Desa persepektif Ekonomi Islam.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya kabupaten Lampung Tengah.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun Subjek dan Objek Penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah”.

4. Populasi dan Sempel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1888 kk.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), H. 215.

b. Sampel

Sempel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai wakil dari para anggota populasi.¹⁸ sample disini peneliti menggunakan teknik sampling yaitu insidental sampling, Insidental Sampling adalah teknik penentu sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai narasumber atau responden.¹⁹ Dalam hal ini peneliti menjadikan narasumber atau responden adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta Masyarakat Desa Surabaya Ilir Sebanyak 40 orang.

c. Sumber Data

- 1. Data primer** adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang dianggap bisa memberikan data secara langsung kepada peneliti baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya.²⁰ Sebagaimana terlampir
- 2. Data sekunder** adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²¹ Dalam penelitian ini data sekunder yang di peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

¹⁸ Ibid, H. 215.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁰ Ibid, H. 225.

²¹ Ibid, h. 225.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²² Yang dijadikan tempat observasi adalah di Desa Surabaya Ilir terutama tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengalokasi Dana Desa Di Desa Surabaya Ilir.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan secara langsung baik dengan tidak terstruktur agar peneliti mendapatkan informasi yang seluasnya yang ditujukan kepada kepala desa, jajaran aparatur desa serta masyarakat desa Surabaya Ilir tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dapat juga

²² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.154.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op.Cit*, h. 83.

bentuk file yang tersimpan di server serta data yang tersimpan di website.²⁴

1. Data Pendapatan ADD
2. Profif Desa Surabaya Ilir
3. Struktur Desa Surabaya Ilir

6. Pengolaan Data

Setelah data-terkumpul melalui tahap-tahap diatas maka peneliti dapat mengelola datanya dengan menggunakan beberpa metode-metode yang akan digunakan sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Data yang di peroleh harus cukup banyak dengan jumlah data-data yang ada dilapangan serta terperinci dan teliti.

b. Pemeriksaan Data (*Editing*)

pemeriksaan data adalah pengecekan data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang telah masuk atau terkumpul ini tidak logis dan meragukan. tujuan pemeriksaan data adalah menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan yang bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau di perbaiki.

c. Penandaan (*Coding*)

Penandaan atau *coding* adalah mengklasifikasi jawaban-jawabandari pada responden ke dalam kategori-kategori. biasanya

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 21

diklasifikasikan dengan cara memberikan kode atau tanda dalam bentuk angka pada masing-masing jawaban.

Dalam penelitian kualitatif ini pengajuan data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, yang sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

7. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁵

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulannya. dalam menganalisa peneliti menggunakan metode-metode berfikir deduktif yaitu mengangkat dengan fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum tersebut ditarik ke generalisasi yang mempunyai sifat khusus.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016) h.244

Berdasarkan hasil dari Observasi dan wawancara peneliti dapat menganalisa berbagai informasi yang didapat yaitu terkait dengan Peran Pemerintah Dalam Mengalokasikan Dana Desa, kemudian menganalisis Peran Pemerintah Desa yang efektif dalam Mengalokasikan Dana Desa dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat serta menganalisis Peran Pemerintah Desa yang Efektif menurut Perspektif ekonomi Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effectiveness* yang berarti berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Menurut Siagian efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.²⁶

Efektivitas Menurut Osborne dan Gaebler, efisiensi adalah ukuran seberapa banyak yang dikeluarkan untuk masing-masing unit *output*, sedangkan efektivitas adalah ukuran kualitas *output* itu. Ketika mengukur efisiensi, harus diketahui seberapa banyak biaya yang ditanggung untuk mencapai sesuatu *output* tertentu.²⁷ Ketika mengukur efektivitas harus diketahui apakah investasi dapat berguna. Efisiensi dan efektivitas merupakan hal penting, tetapi ketika organisasi publik kinerja, seringkali hanya mengukur tingkat efisiensi saja. Sedangkan efektivitas pelaksanaan

²⁶ Siagian, *Kia Meningkatkan Produktivitas Kerja*. (Jakarta :Bineka Cipta,2002)

²⁷ Osborn dan Gaebler, *Reinventing Government*, (Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo,1997).

program lazimnya berkaitan dengan upaya pengukuran atau penilaian terhadap sejauh mana tercapainya tujuan.²⁸

menurut Sondang dalam Othung efektifitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa dan kegiatannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat pendekatan efektivitas menurut beberapa ahli mengenai pendekatan yang dapat di pergunakan dalam mengukur keefektivitasan program pemerintah desa antara lain :

- a. Menurut Gibson, doneli dan ivan cefich, mengemukakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan pendekatan sistem.²⁹
- b. Menurut Robbin, membagi kedalam 4 pendekatan dalam mengukur efektivitas pemerintahan desa yaitu : pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituen – strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing. Pengertian efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan .

Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas diatas dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu

²⁸ Makmur Kamblong dan Suriyani, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan.” (Jurnal Dunn, 3003:429).

²⁹ Gibson, doneli dan ivan cefich *Teori Efektivitas* h.27-29

program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Maraknya otonomi daerah mendorong pemerintah desa untuk memperdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada, baik itu sumberdaya dari desa itu sendiri maupun dari desa luar. Salah satu sumberdaya dari luar desa adalah alokasi dana dari pemerintah daerah dalam wujud Alokasi dana Desa (ADD). Mengandung makna bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sesuai dengan kewenangan asli maupun yang di berikan, yang menyangkut peranan pemerintah Desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di Desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatannya salah satu hal yang penting untuk di perhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya.

Penetapan pembiayaan pembangunan berasal dari berbagai sumber-sumber dari pemberintah, swasta maupun masyarakat. Selama ini pembangunan desa masih banyak tergantung dari pendapatan asli desa dan

swadaya masyarakat yang jumlahnya maupun sifatnya tidak dapat di prediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pendesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang di tingkat nasional di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan kemudian di tindak lanjutin oleh surat edaran menteri dalam negeri Nomer 140/60/SJ tahun 2005 tentang Pedoman alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa.³⁰ Dalam Peraturan Pemenrintah Nomer 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 ayat 1 point c, disebutkan bahwa bagian dari dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Jadi Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian danaperimbangan keuangan pusat yang di terimah oleh kabupaten.³¹ Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomer 72 tahun 2005 tentang Desa

³¹ Peraturan Pemenrintah Nomer 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 ayat 1 point c

a. Pengertian Alokasi Dana desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2015 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota untuk paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.³²

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebut bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen).³³

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam Anggaran Pendapatan dan Bealaja Daerah setelah di kurangi Alokasi Dana Khusus.³⁴

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada Desa yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan-keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman keuangan pengelolaan desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) .

³³ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 18.

³⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4)

(ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah untuk Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).³⁵

Pengelolaan Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut :

- (a) Setiap kegiatan yang pendapatannya diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip : dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (b) Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
- (c) Alokasi Dana Desa (ADD) harus digunakan dengan prinsip sehat, terarah dan terkendali.
- (d) Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, pengaruh kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan mengambil keputusan melalui jalan musyawarah.

³⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal

- (e) Alokasi Dana Desa (ADD) harus di catat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku.³⁶

b. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum. segala sesuatu yang berhubungan dengan Negara diatur oleh peraturan perundang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Negara Indonesia terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan oleh pemerintahan dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bentuk wilayah pemerintahan tersebut adalah kecamatan, kelurahan dan desa yang terletak di wilayah pemerintahannya Kabupaten atau kota-kota.

Desa Adalah nama lain yang dimana ada kesatuan masyarakat hukum atau yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18

Dalam Undang-undang Desa terdapat berbagai sumber pendapatan desa. Khususnya menyangkut Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf (d) bahwa alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.³⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan desa, dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka harus di pahami juga bahwa desa juga sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut termasuk juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.³⁸

Bagi Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, istilah “Pemerintah yang disentralisasikan” merupakan alternatif istilah yang mungkin sesuai untuk desentralisasi kewenangan pusat kepada daerah. Hal ini berdasarkan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang berbunyi :

³⁷ UUD Negara RI 1945 Pasal 18 ayat (1) Bahwa Negara Kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang di atur dalam undang-undang

³⁸ Abu Rahum, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”, (eJournal Ilmu Pemerintahan : 3 (4) 1623-1636 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2015), h. 2

Urusan pemerintah yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal monere nasional
- f. Agama.³⁹

Pada pasal 10 ayat (3) tersebut menyatakan bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah. Demikian pula masih dikenal adanya tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantu sebagaimana yang diatur dalam dalam pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yaitu : dalam urusan pemerintah menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintah sebagaimana di maksud pada ayat (3), pemerintah dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintahan.
- b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah
- c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas dan pembantuan.⁴⁰

³⁹*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 10 ayat (3)*

⁴⁰*Ibid, pasal 10 ayat (5)*

Dalam kaitannya dengan topik dengan topik bahasan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka besar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa, Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan Bagian Kedua (Aset Desa, Pasal 76-77)
2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

c. Maksud, Tujuan, dan Sasaran Alokasi Dana Desa

Pada 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.⁴¹

⁴¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 ayat (2) point (b), (d)

Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (1) Disebutkan bahwa :

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayakan masyarakat desa
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi :
 - a. Kepala desa
 - b. Perangkat desa
 - c. Anggota badan permusyawaratan desa
 - d. Anggota lembaga kemasyarakatan desa.
5. Mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.

Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa :

1. Membangun dan memelihara lingkungan desa
2. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik
3. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa;
4. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan di desa
5. Berpartisipasi dalam kegiatan di desa.⁴²

Untuk mewujudkan kewajiban desa dan hak masyarakat desa tersebut maka sangat diperlukan tersedianya dana untuk itu. Salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun maksud, tujuan dan sasaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

1). Maksud

Maksud dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kemudian di salurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Untuk setiap Kabupaten-kabupaten yang terdiri dari beberapa desa di setiap kabupaten tersebut, maka khusus di kabupaten Lampung Tengah peneliti, meneliti di

⁴² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 ayat (1),(2)

desa Surabaya Ilir tepatnya di Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung yang membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat di desa Surabaya Ilir tersebut.

2). Tujuan

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaran pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengadilan serta pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/miskin.⁴³

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

⁴³ Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (Selatpanjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, 2014)

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMdesa)⁴⁴.

3). Sasaran

Sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
- d. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat⁴⁵.

Dengan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagikan kepada 310 desa yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten lampung tengah.

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut sangat dipengaruhi oleh

⁴⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, BAB IX Pasal 19.

⁴⁵ Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (Selatpanjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, 2014).

kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah agar penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut tidak terjadi penyalahgunaan atau tepat pada maksud, sasaran dan tujuan.

3. Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintah diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagai dalam memerintah.⁴⁶ Sehingga secara etimologi terus menerus (continue) atau kebijakan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tatacara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki.

Secara etimologis pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut Poer Wardarmita, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- 2) Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu negara (daerah, negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- 3) Pemerintah adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai tujuan negara itu sendiri. (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

⁴⁶ Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Bandung : Fokusmedia) 1976, h.17.

Berdasarkan pengertian diatas dalam penelitian ini pemerintah desa melaksanakan pemerintahan desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjalankan sistem pemerintahan desa yang baik sesuai dengan undang-undang untuk tercapainya tujuan desa itu sendiri.

Menurut Samual Finer mengakui ada pemerintahan dan pemerintahan dalam arti luas, dengan adanya pemerintah dan pemerintah dalam arti luas, tentunya akan mempunyai pengertian pemerintah dan pemerintah dalam arti luas dan sempit, yaitu:

- 1) Pemerintah dalam arti sempit, yaitu : perbuatan memerintah yang dilakukan oleh eksekutif, yaitu presiden dibantu oleh para mentri-mentrinya dalam rangka mencapai tujuan negara.
- 2) Pemerintah dalam arti luas, yaitu : perbuatan memerintah yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintah negara.

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafie yang mengutip dari C.F Strong dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Pemerintahan” sebagai berikut :

“Maksudnya pemerintah dalam arti luas kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. *Kedua* harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang. *Ketiga*, harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan

masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara“.⁴⁷

Pendapat lain menurut Pranadjaja dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antar Negara Pemerintah”, pengertian pemerintah adalah sebagai berikut :

“istilah pemerintah adalah berasal dari perintah, yang berarti perkataan, yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan diatas yaitu pemerintah dalam arti sempit adalah kepala desa bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

b. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumahtangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini tercermin dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004.

Menurut HAW.Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa :

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan

⁴⁷ Inu Kencana Syafie) yang mengutip dari C.F Strong *Ekologi Pemerintahan*, 2008. h.89

⁴⁸ Pranadjaja *Hubungan antar Negara Pemerintah*. 2003 h.24

pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.⁴⁹

Desa menurut UU Nomer 32 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa atau yang di sebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mnegatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Nomer 32 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 12).

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikat Negara untuk mengotonomikan Desa dengan berbagai kemandirian pemerintah desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, dan berbagai kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, penyebab daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau Kota, dan Desa. Revormasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun di ramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.⁵⁰

Pengertian Desa menurut HAW. Widjaja dan UU tahun 2014 sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri, dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai

⁴⁹HAW. Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), h.3.

⁵⁰ Permata press, *Undang-Undang Desa & Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015*,h.117.

dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggara otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggara pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

Pemerintah desa menurut HAW. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintah Desa diartikan sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Pemerintah Desa Merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga Desa memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati”.⁵¹

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan pemerintah desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

c. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sebagai masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik

⁵¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), h.3.

maupun hukum perdata memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Sebagai wujud demokrasi, di desa dibentuk badan perwakilan desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa serta keputusan kepala desa. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa.⁵²

d. Tugas, Hak, dan Wewenang Pemerintah Desa

Prinsipian tentang Wewenang Tugas dan tanggungjawab kepala desa memang sangat sulit dibuat. Hal ini dikarenakan sangat beragam dan kompleks meskipun ruang lingkupnya sebatas desa, yang merupakan bagian administratif terkecil dan badan pemerintahan negara terendah. Selain itu, wewenang dan tugas kepala desa terdapat di peraturan-peraturan dan adat.⁵³

Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Bagian Kedua Kepala Desa pada pasal 26 ayat :

- (1) Kepala desa bertugas meneyenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

⁵² HAW. Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), h.165

⁵³ H.A Tabrani Rusyan, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa* (Jakarta : PT. Parogantama Jaya), h. 69

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan kepala desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala desa berhak :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

- g. Menjalin kerjasama dan kordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat didesa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan didesa.
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan ;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.⁵⁴

Pada pasal 27 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26, Kepala Desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b. Menyampaikan Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.

⁵⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat point (1) (2) (3) (4)

- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran dan;
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.⁵⁵

e. Fungsi pemerintah Desa

Fungsi pemerintah desa adalah menyelenggarakan seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Pemerintah desa melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan. Pemerintah Desa mengsosialisasikan dan memotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. pemerintah desa juga menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Serta tugas pemerintahan desa yang lain di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 27.

⁵⁶ Rusyan Tabrani, *Membangun efektivitas kinerja kepala desa*, (Jakarta: bumi aksara, 2018) h.70

f. Efektivitas Peran Pemerintah Desa dalam (ADD)

Indikator Peran Pemerintah yang efektif dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) adalah yang tercantum pada Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “*keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*”.⁵⁷

1. Transparan merupakan prinsip pengelolaan uang yang tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum atau peraturan yang terkait.
2. Akuntabel atau akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan didalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai sebuah tujuan tertentu yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif merupakan suatu tindakan yang semestinya dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat penyalurkan sebuah aspirasinya.
4. Tertib dan disiplin anggaran merupakan seluruh anggaran desa dilaksanakan secara konsisten dan dilakukan dengan pencatatan atas

⁵⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Nomor 113 tahun 2014

penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang ada di desa.

g. Peran Pemerintah Desa Dalam Ekonomi Islam

Pemerintah memiliki kedudukan dan perana penting dalam ekonomi islam. Eksistensi peran pemerintah dalam sistem ekonomi islam bukan semata-mata karena adanya kegagalan pasar dan ketidaksempurnaan pasar. Pada dasarnya, peran pemerintah merupakan derivasi dari konsep kekhilafahan dan konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*) untuk merealisasikan *falah*. Pemerintah adalah pemegang amanah Allah dan Rosul-Nya serta amanah masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (*al-adl wal ihsan*) bagi seluruh umat. Secara umum peranan pemerintah akan berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan ekonomi islam secara keseluruhan.

Disamping tugas yang berkaitan dengan pasar pemerintah memiliki tanggungjawab yang luas sehubungan dengan upaya mewujudkan tujuan ekonomi islam secara keseluruhan tanggungjawab ini pada dasarnya mencakup berbagai tugas luas yang bersifat kontekstual, sepanjang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kolektif dalam penerapan ajaran islam. Akan tetapi beberapa tugas pokok pemerintah antara lain :

1. Manajemen terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat;
2. Pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan;
3. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi; dan

4. Mengambil berbagai kebijakan ekonomi dan non ekonomi yang relevan bagi perwujudan falah masyarakat.⁵⁸

Dalam ajaran islam pemenuhan kebutuhan dasar serta pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan bukan hanya tugas individual masyarakat, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif seluruh masyarakat, setiap individu harus berusaha memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya, dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan ini, sebab negara dibentuk memang untuk mengemban berbagai tugas kolektif. Negara memiliki perangkat dan sumberdaya termasuk keuangan untuk memberikan jaminan ini. Desain pembangunan ekonomi secara keseluruhan tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar, sebab pasar memiliki kegagalan dan tidak kesempurnaaan. Negara bertuga untuk membuat perencanaan sekaligus mengawasi jalannya pembangunan ekonomi. Untuk mengelola perekonomian, pemerintah dalam sistem ekonomi islam akan menggunakan kebijakan moter fiskal dengan pendekatan multidisplin.⁵⁹

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai titik tolak ukur dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang penulis jadikan penelitian yang relevan. Penelitian tersebut dilakukan ditempat penelitian yang berbeda dengan paparan yang berbeda.

⁵⁸ P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia *Ekonomi Islam*, (Jakarta pers 2013) h.84

⁵⁹ *Ibid.* h.85

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan masalah yang sesuai, yang ada dipenelitian sebelumnya.

1. Penelitian dilakukan oleh Hamzah Halim (2018) yang berjudul “Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Balatak Kabupaten Banggai” penelitian ini memfokuskan pada permasalahan implementasi penggunaan ADD di Desa Talima B, Desa Ra’u dan Desa Dolom di Kecamatan Balatak.
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Daud Liando (2018) yang berjudul “Kinerja Pemerintahan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa” Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam peraturan masyarakat desa dan keberhasilan nasional. Karena perannya yang sangat besar, maka perlu peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. ADD merupakan salah satu sumber keuangan desa dari beberapa sumber keuangan desa. ADD di peruntukan dalam penerapannya dan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menjalankan roda pemerinthan dan roda pembangunan desa.

C. Kerangka Berfikir

Peran Pemerintah dalam Mengalokasikan Dana Desa sangatlah dibutuhkan terutama bagi Pemerintah yang ada di pendesaan khususnya di Desa Surabaya Ilir, keberhasilan Peran pPemerintah dalam Mengalokasikan

Dana Desa dapat diukur melalalui beberapa indikator yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta Tertib dan disiplin Anggaran.

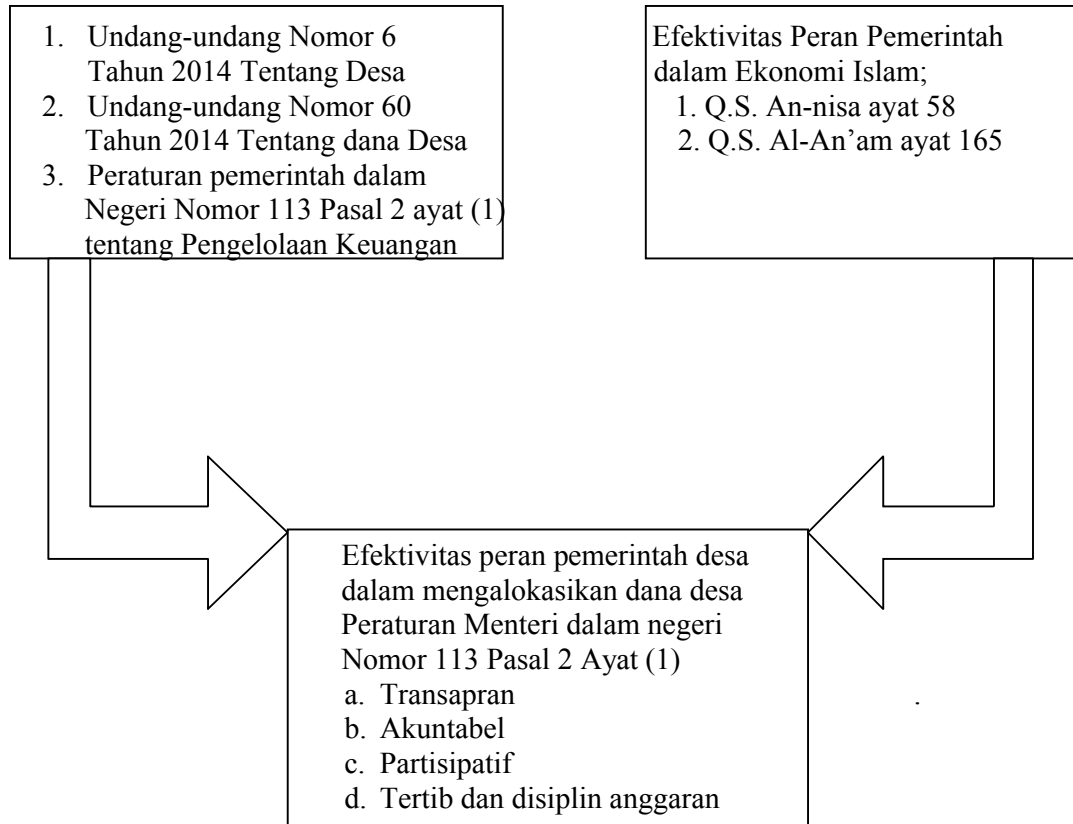
Dengan demikian, Pemerintah Desa memiliki fungsi pengaturan dan fungsi pembangunan, mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengatur kewenangan bagi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, desa diberikan kesempatan mengurus tata pemerintah serta melaksanakan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Seiring berjalannya peraturan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa tersebut, pemerintah mengesahkan kembali peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dan desa yang bersumber dari APBN dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan dana desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Kebijakan pemerintah pusat terkait dana desa tersebut di implementasikan sejak tahun 2015 setiap masing-masing desa diberikan dana sebesar 1 M untuk masing-masing desa dana tersebut di gunakan untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya. Adapun dana desa tersebut diterima juga oleh desa surabaya ilir kecamatan bandar surabaya kabupaten lampung tengah.

Salah satu yang terkandung dalam administrasi publik adalah efektivitas, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang menunjukkan tingkat pencapaiannya suatu tujuan yang telah di rencanakan. Dalam pelaksanaan peran pemerintah desa peneliti ingin mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan peran pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa di desa surabaya ilir. Pembagian penggunaan dana desa sesuai dengan Standar Oprasional (SOP) terbagi atas 30% untuk oprasional dan 70% digunakan untuk pembiayaai pembangunan.

Alasan memilih variabel di atas dikarenakan hal tersebut merupakan indikator atau pengukuran yang tepat dari efektivitas peran pemerintah apabila dilihat dari aspek pelaksaannya sebuah kebijakan, efektivitas kebijakan akan muncul ketika melihat tujuan yang telah ditetapkan untuk memberikan solusi masalah yang ada. Untuk menjelaskan kerangka berfikir pada penelitian ini. Berikut adalah gambar atau bagan kerangka pikir yang digunakan :

2.1 Gambar Kerangka Berfikir



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. PROFIL DESA

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Surabaya Ilir

Desa Surabaya Ilir atau biasa disebut Kampung adalah sebuah Kampung yang terletak di Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, Indonesia adalah sebuah Kampung yang berdiri sejak tahun 1927 yang dimna kependudukannya merupakan pindahan atau pendatang dari Kampung Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung timur. Pada tahun 1927 desa ini mulai dihuni oleh seorang keturunan cina dan desa ini dahulu dikenal dengan sebutang kebun cang. Kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh memulai merintis membuat pemukiman baru atau yang biasa disebut bahasa lampungnya dengan nyusuk yang artinya memulai dari awal. Kemudian lama kelamaan masyarakat dari Surabaya Udik menyusul atau datang juga untuk membuat perukiman bersama-sama dengan mereka yang telah datang lebih dahulu sehingga masyarakat bertambah banya. Kemudian pada tahun 1938 mereka membangun rumah ibadah atau masjid yang pertama.

Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ini mulai membentuk kepala kampung atau kepala desa yang pertama dan membentuknya selama lima tahun sekali.⁶⁰

⁶⁰ *Wawancara* dengan Sulaiman, Tokoh Masyarakat Desa Surabaya Ilir, 3 Mei 2019

2. Visi Misi Desa Surabaya Ilir

Visi “Terwujudnya Desa yang Aman,Maju, Sejahtera dan Berkeadilan.”

Misi

1. Meningkatkan keamanan, ketertiban, serta kerukunan umat beragama dalam kehidupan sosial yang beragam,demokrasi dan berkeadilan.
2. Mendorong kemandirian dalam bermasyarakat.
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian.
4. Meningkatkan etos kerja.⁶¹

3. Kondisi Geografis Desa Surabaya Ilir

Kondisi Geografis Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya kabupaten Lampung Tengah yaitu:

a. Letak Desa Surabaya Ilir

Desa Surabaya Ilir adalah salah satu dari 310 desa yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Desa Surabaya Ilir ini berepatan di pusat pemerintahan Kecamatan Bandar Surabaya.

b. Batas Wilayah Desa Surabaya Ilir

Sebelah Utara berbatasan pada Desa Rajawali, sebelah selatan berbatasan pada Desa Gaya Baru 5, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Beringin Jaya dan Desa Sumber Agung.

⁶¹ Wawancara dengan Kepala Kampung Surabaya Ilir, 14 Mei 2019

c. Luas Wilayah Desa Surabaya Ilir

Desa Surabaya Ilir merupakan salah satu desa yang tergolong sedang wilayahnya jika dibandingkan dengan penduduk yang ada di wilayah Desa tersebut.⁶²

Penggunaan lahan terbesar di Surabaya Ilir adalah untuk perkebunan perorangan rata-rata 592 ha, pemukiman 30 ha, pekarangan 15 ha, ladang 12 ha, infrastruktur fisik desa 41 ha berupa jalan, lapangan olahraga, sekolahan, perkantoran pemerintah dan pemakaman umum. Perumahan masyarakat di Surabaya Ilir tidak tergolong padat, sebab masih banyak yang mempunyai pekarangan rumah yang dapat dimanfaatkan untuk menanam sayuran dan lain sebagainya.

4. Kondisi Masyarakat Desa Surabaya Ilir

Data komposisi penduduk sangat penting untuk perencanaan pemerintah dalam segala bidang maupun dalam dunia usaha. jika dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat maka, kesejahteraan masyarakat diukur dari beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan ukuran pencapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak dan berkembang atau tidak.

a. Jumlah Penduduk

Penduduk di desa Surabaya Ilir pada tahun 2017 terdiri dari 1888 kepala keluarga. Desa Surabaya Ilir adalah salah satu dari 310 desa yang ada di

⁶² Wawancara dengan Kepala Kampung Surabaya Ilir, 14 Mei 2019

Kabupaten Lampung Tengah. Desa Surabaya Ilir ini berepatan di pusat pemerintahan Kecamatan Bandar Surabaya.

b. Mata Pencairan Pokok

Indikator umum yang sering digunakan dalam mengukur kualitas sumber daya manusia adalah mata pencaharian. bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Surabaya Ilir bervariasi. Beberapa masyarakat desa Surabaya Ilir yang berprofesi sebagai petani.

c. Batas Wilayah Desa Surabaya Ilir

Sebelah Utara berbatasan pada Desa Rajawali, sebelah selatan berbatasan pada Desa Gaya Baru 5, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Beringin Jaya dan Desa Sumber Agung.

d. Luas Wilayah Desa Surabaya Ilir

Desa Surabaya Ilir merupakan salah satu desa yang tergolong sedang wilayahnya jika dibandingkan dengan penduduk yang ada di wilayah Desa tersebut.⁶³

e. Pendidikan

Indikator pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu daerah. Pendidikan diharapkan akan menambah produktifitas penduduk. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumberdayanya.

⁶³ Sumber wawancara, bapak Usman Kepala Kampung Surabaya Ilir, 12 Mei 2019

Tingkat pendidikan di Desa Surabaya Ilir Penantian terdiri dari masyarakat yang belum sekolah, tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, sampai tamat di Perguruan Tinggi.⁶⁴

Menurut bapak Bustomi salah satu Masyarakat Desa Surabaya Ilir di keluarganya ada 1 orang yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi (S1) dan 1 orang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan 1 orang sedang menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD).⁶⁵ Sementara juga menurut Bapak Agus mengatakan di keluarganya ada 3 orang yang tamat SLTA dan 2 anak sedang menempuh di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)⁶⁶.

Sejak Desa Surabaya Ilir Berdiri samapai sekarang, telah berdirinya pendidikan formal dan norformal, yaitu terdiri dari 3 unit Taman Kanak-kanak, 1 unit Madrasah Ibtidaiyah, 1 unit Sekolah Dasar, 1 unit Sekolah Menengah Pertama, 1 Unit Madrasah Tsanawiyah, 1 unit Madrasah Aliyah dan 1 Unut Sekolah Menengah Atas dan masih banyak Tempat Pendidikan Al-qur'an.⁶⁷

⁶⁴ Sumber wawancara, bapak Bustomi, masyarakat desa Surabaya Ilir, 12 Mei 2019

⁶⁵ Sumber wawancara, bapak Bustomi, masyarakat desa Surabaya Ilir, 12 Mei 2019

⁶⁶ Sumber wawancara, bapak Agus, masyarakat desa Surabaya Ilir, 12 Mei 2019

⁶⁷ Sumber wawancara, Usman Selaku masyarakat sekaligus Kepala Kampung Surabaya Ilir, 12 Mei 2019

5. Agama penduduk Desa Surabaya Ilir

Masyarakat Desa Surabaya Ilir 98% penduduknya beragama Islam dan ada juga masyarakat yang non beragama Islam yaitu 2%. Sarana tempat beribadahnya ada 11 Masjid dan 7 Mushola.⁶⁸

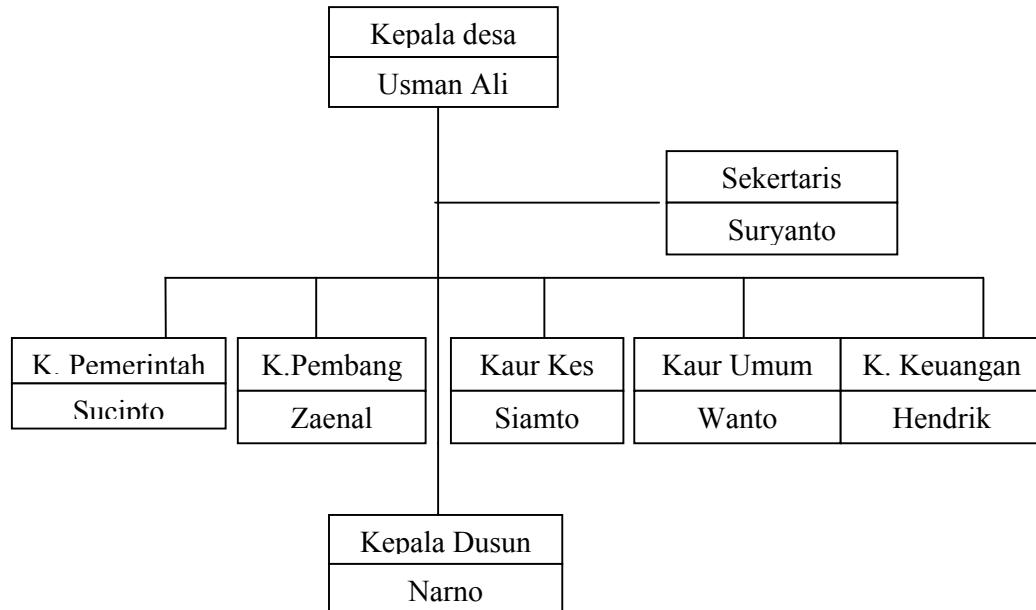
6. Struktur Perangkat Desa Surabaya Ilir

Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintah untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatnya memiliki porsinya masing-masing. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat perdesaan setempat berdasarkan dengan Undang_undang yang ada demi mewujudkan pembangunan desa diwilayah desa.

Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu dengan jajaran atau perangkat desa lainnya dalam mengurus keperluan desa. Setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya. Berikut struktur Pemerintahan Desa yang ada beserta tugas dan fungsinya:

⁶⁸ Sumber wawancara, Usman Selaku masyarakat sekaligus Kepala Kampung Surabaya Ilir, 12 Mei 2019

Gambar 3.1 Struktur Perangkat Desa Surabaya Ilir



1. Kepala Desa

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagaimana unsur penyelenggaraan pemerintah desa.⁶⁹ Yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah perangkat pembantu kepala desa menjalankan tugasnya, fungsinya adalah sebagai menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan

⁶⁹ Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3)

desa dan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan desa.

3. Badan Pemerintah Desa (BPD)

Badan Pemerintah Desa adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan kewilayahannya. Fungsi dari BPD tersebut adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa.

Struktur pemerintah desa yang lain telah dibentuk dan di tugaskan pada tupoksi nya masing-masing sesuai dengan undang-undang yang telah diatur untu desa. Setiap perangkat desa diharapkan melakukan fungsinya dengan baik.

Desa Surabaya Ilir Tersebut memiliki 12 Dusun Dalam Desa Surabaya Ilir, masing-masing memiliki ketua atau kepala dusun, kepala dusun tersebut dibagi atas beberapa RT dan beberapa Kepala Keluarga.

B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Surabaya Ilir

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 93 ayat (1) meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan

e. Pertanggungjawaban.⁷⁰

Menurut peraturan Bupati Lampung Tengah No. 04. A Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015, Alokasi Dana Desa yang kemudian disingkat (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk dana yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh kabupaten Lampung Tengah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Desa atau Kampung Surabaya Ilir telah mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten Lampung Tengah. Standar prosedur pengelolaan keuangan desa atau kampung surabaya ilir yang digunakan oleh kepala desa atau kepala kampung dan jajarannya dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desasejak dimulainya perencanaan dan pengawasan.

Dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Provinsi Lampung Peraturan Daerah Bupati Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Kampung. Pada Bab II Sumber Pendapatan Kampung Pasal 2 pendapatan kampung terdiri:

- a. Pendapatan asli kampung terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli kampung.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 93 ayat (1)

- d. Alokasi dana kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga; dan
- g. Lain-lin pendapatan kampung yang sah.⁷¹

Bupati Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Kampung Pada Bab V Tentang Alokasi Dana Kampung Pasal 9 yaitu:

- (1) Pemerintah kabupaten mengalokasikan dalam APBD alokasi dana kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Kampung dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung.
 - b. Jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Ketentuan tatacara pengalokasian Alokasi Dana Kampung (ADK) diatur dengan peraturan Bupati Alokasi Dana Kampung bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah kampung dalam

⁷¹ Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Kampung. Pada Bab II Sumber Pendapatan Kampung Pasal 2

menyelesaikan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan wewenangnya.⁷²

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Kampung Pada Bab VI Dana Kampung yang Bersumber Dari APBN Pasal 11 dan pasal 12 yaitu

Pasal 11

- (1) Bupati menentukan besaran dana kampung yang diterima masing-masing kampung.
- (2) Perhitungan besaran Dana Kampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kampung dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Dana kampung setiap kampung di hitung berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar, yang sudah ditentukan besarnya pada Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot sebagai berikut: % (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk kampung; % (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah kampung; % (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah

⁷² Bupati Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Kampung Pada Bab V Tentang Alokasi Dana Kampung Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3)

penduduk miskin kampung; dan % (tiga puluh per seratus) untuk indeks kesulitan geografis.

Pasal 12

- (1). Rumus perhitungan dana dikampung dihitung sebagai berikut : Dana kampung setiap kampung = (Dana Kampung Alokasi Dasar) X [(25% X Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung kabupaten) + (35% X rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung kabupaten) + (30% X rasio IKG setiap kampung terhadap total IKG kampung kabupaten)
- (2). Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementrian keuangan.⁷³

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Surabaya Ilir Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk untuk desa pertahunnya. Dana tersebut di peruntukan dan digunakan untuk desa terkhusus desa Surabaya Ilir yang sedang peneliti teliti. Dimana setiap tahunnya masing-masing desa disetiap provinsi atau kabupaten menerima Alokasi Dana Desa (ADD) hingga mencapai 1 Miliyar tiap tahunnya. Dalam menggunakan dana tersebut 30% digunakan untuk operasional sedangkan 70% digunakan untuk pembangunan.

⁷³ Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Kampung Pada Bab VI Dana Kampung yang Bersumber Dari APBN Pasal 11 dan pasal 12

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa (ADD) Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan nonfisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi hal ini diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Surabaya Ilir agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program Pemerintah Desa berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahap perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipasi dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), Bendahara Desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di Desa.

Perencanaan dengan model partisipasi dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di Desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam daftar usulan rencana kegiatan (DURK) yang hasilnya adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat. Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan di Desa Surabaya Ilir masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang, lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 4.1 Tahapan perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan Musrembang.

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi	Persen (%)
Perencanaan	Kegiatan musrembang	Hadir	30	66,66
		Hadir dan berpendapat	-	-
		Tak hadir	10	33,33
		Total	40	100
	Pokok bahasan	Jumlah pengangguran	20	66,67
		Penyusunan rencana	3	10
		Tidak tahu	7	7
		Total	30	10
	Hasil musrembang	Tersusunnya DURK	-	-
		Belum tersusunnya DURK	20	76,67
		Tidak tahu	10	23,33
		Total	30	100
	Sosialisasi DURK kepada masyarakat	Ada	20	76,67
		Tidak ada	16	70
		Tidak tahu	5	10
		Total	30	100

Sumber : Data di olah dari kantor Kampung Surabaya Ilir Tahun 2017

Keterangan : DURK (Daftar Usulan Rencana Kerja)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi atau pendapat dalam musrembang dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dari responden 40 dengan jumlah keseluruhan responden ada 95 dengan kalangan masyarakat, sebanyak 30 orang atau 66,67 % yang menghadiri kegiatan musrembang desa tersebut, tetapi mereka tidak menyampaikan aspirasi/usulan rencana kegiatan. Sedangkan 10 orang atau 33,33 % lainnya tidak hadir.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Surabaya Ilir yaitu Bapak Usman mengenai tahapan perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang, yaitu sebagai berikut:

“Dalam kegiatan musrembang yang dilakukan masih kurangnya partisipasi masyarakat jika dilihat dari segi daftar hadir maupun aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat saat musrembang saat berjalan, masih banyak sekali masyarakat yang kurang peduli terhadap kegiatan musrembang di desa Surabaya Ilir”.⁷⁴

Kondisi tersebut menyebabkan kondisi musrembang desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Surabaya Ilir tidak berjalan dengan baik, terbukti dengan tidak adanya rencana kegiatan yang tersusun sesuai dengan harapan atau rencana.

2. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan, dengan Anggaran Dana Desa di Desa Surabaya Ilir didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang sumber pendapatan kampung atau lokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa diperuntukan untuk pembangunan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% untuk kegiatan pemerintah desa, serta 70% digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

⁷⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Surabaya Ilir, 13 Mei 2019

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang sumber pendapatan kampung atau lokasi Dana Desa (ADD). Besaran Alokasi Dana Desa yang di peroleh Desa Surabaya Ilir adalah sebesar Rp.1,515,754,925 (satu milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Adapun terkait Peranan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Surabaya Ilir dapat dilihat pada 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2017

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persen (%)
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Operasional, Penyusunan, dan Pembangunan/Rehabilitas Kantor Desa	638,298,027	40,25
Pembinaan Kemasyarakatan	PKK, LPMD, Lembaga Keamanan, Keolahragaan, dan Kader posyandu	74,273,898	8,42
Pembangunan Desa	Irigasi, Rambat, Beton, Drainase, BUMdesa	687,378,200	32,18
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelatihan, Penyuluhan dan Peningkatan	115,804,800	19,15
Total		1,515,754,925	100

Sumber : Diolah dari laporan Pertanggung Jawaban Desa Surabaya Ilir Tahun 2017

Tabel 4.2 menunjukan bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Surabaya Ilir adalah sebesar 1,515,754,925 dimana pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Surabaya Ilir diperuntukan untuk pembangunan desa, pembinaan masyarakat,

penyelenggaraan pemerintah desa, dan pemberdayaan desa dengan jenis kegiatan yaitu, Irigrasi, Rambat, Beton, Drainase dan Pembinaan BUMdesa dengan anggaran Rp 687,378,200 atau sekitar 40,25% PKK Desa, LPMD, Lembaga Keamanan, Keolahragaan dan kader posyandu dengan anggaran sebesar Rp 74,373,898 atau sekitar 8,42%, Operasional, Penyusunan, dan Pembangunan/Rehabilitas kantor desa dengan anggaran sebesar Rp 638,298,027 atau sekitar 32,18% dan Pelatihan, Penyuluhan, dan Peningkatan dengan anggaran sebesar Rp 115,804,800 atau sekitar 19,15%.

Informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terkait tahapan pelaksanaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Surabaya Ilir bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih sangat rendah, baik dalam bentuk tenaga maupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa Surabaya Ilir. Hal ini terkait dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di Desa Surabaya Ilir yaitu, Irigrasi, Beton, rambat, Drainase, dan pembinaan BUMdesa. Informasi ini terkait dari hasil wawancara bahwa dalam kegiatan tersebut tidak ada sama sekali partisipasi dari masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut.

Hal tersebut terkait dengan ditemukannya dengan Kepala Kampung atau Desa Surabaya Ilir yaitu Bapak Usman yang menyatakan bahwasannya adalah sebagai berikut:

“Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pembangunan masih rendah apalagi dalam pengelolaan dana desa di tahun 2017, lebih banyak di alokasi di kantor desa Surabaya Ilir”.⁷⁵

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan Pemerintah Desa masih kurang transparasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparasi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, Pemerintah Desa tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa.

Hal ini seperti pertanyaan salah satu anggota masyarakat, yaitu ibu Septiana yang menyatakan bahwa:

“banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan desa karena sebagian masyarakat kecewa dan tidak suka dengan kinerja Kepala Desa Surabaya Ilir yang sekarang, selain kurangnya peduli dengan kondisi sosial masyarakat, juga pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari Desa”.⁷⁶

Pendapat lain yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat Desa Surabaya Ilir yaitu Bapak Adnan yang menyatakan bahwasannya:

“Kondisi Desa saat ini sudah sangat jauh dengan slogan-slogan yang melekat pada Desa, seperti kehidupan Desa yang harmonis, rasa persaudaraan yang

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Surabaya Ilir, 13 Mei 2019

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan anggota Masyarakat, 13 Mei 2019

baik dan semangat gotong royong masyarakat Desa yang tinggi. Diakibatkan sebagian lapisan masyarakat dalam berpolitik yang mengakibatkan hubungan silaturahmi antar masyarakat maupun hubungan aparat Desa yang begitu tak bersinerji”.⁷⁷

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Surabaya Ilir, dari setiap pembangunan desa dengan anggaran Rp 687,378,200. terselesaikan dengan baik, namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengalokasian Alokasi dana Desa (ADD) yang dilakukan di Desa Surabaya Ilir belum efektif. Berikut pertanyaan masyarakat terkait kualitas penyelenggara Pemerintah Desa, salah satunya Kepala Dusun Desa Surabaya Ilir, Bapak Ahmad Fatoni yang menyatakan bahwasannya adalah:

“Banyaknya anggaran yang di pergunakan untuk operasional pemerintah mulai dari tunjangan dan belanja alat-alat kantor tidak memberikan dampak peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, dilihat dari pelayanan yang di berikan kepada masyarakat masih kurang efektif dan banyak masyarakat yang mengeluh”.⁷⁸

Melihat berbagai masalah diatas, walaupun semua rencana yang telah disusun dapat terealisasi dengan cukup baik, Namun, tahap pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Surabaya Ilir dapat dikatakan kurang efektif.

⁷⁷ Wawancara dengan tokoh masyarakat desa surabaya ilir, 13 Mei 2019

⁷⁸ Wawancara dengan Masyarakat desa surabaya ilir, 13 Mei 2019

3. Tahapan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dalam tahapan ini tidak efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak disusun oleh Pemerintah Desa, namun penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban ini disusun dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak Pemerintah atau Lembaga Desa Surabaya Ilir serta tidak ada transparansi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Tabel 4.3 Penilaian Terhadap Pertanggung Jawaban Pengelolaan ADD

Variable	Indikator	Ukuran	Partisipasi	Persen (%)
Pertanggung Jawaban	Pihak Penyusun LPJ	Pemerintah Desa bersama BPD	5	16,67
		Pihak lainnya	8	23,33
		Tidak tahu	27	60
		Total	40	100
	Kualias LPJ	Baik	25	63,33
		Tidak tahu	15	36,67
		Total	40	100
	Evaluasi kegiatan bersama masyarakat	Ada	3	6,67
		Tidak ada	29	80
		Tidak tahu	8	13,33
		Total	40	100

Sumber : Diolah dari Kantor Desa Surabaya Ilir Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Laporan Pertanggung Jawaban dari hasil Wawancara dan observasi sebanyak 5 orang atau 16,67% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Disusun oleh Pemerintah Desa bersama BPD, sedangkan 8 orang lainnya atau 23,33% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disusun oleh pihak lainnya yaitu pihak ketiga yang bukan bersal dari Pemerintah Desa atau Lembaga Desa Surabaya Ilir. Sedangkan sisanya sebanyak 27 orang atau 60% tidak mengetahui siapa pihak penyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Surabaya Ilir tersebut. Dan hasil menunjukan bahwa, laporan pertanggungjawaban Desa Surabaya Ilir memang tidak disusun oleh Pemerintah Desa selaku penganggungjawab pelaksanaan kegiata, melainkan disusun oleh pihak lainnya.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara Desa Surabaya Ilir yaitu Bapak Setumi yang mengatakan bahwasannya :

“Dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kami tidak memili masalah, malahan dari keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Lampung Tengah kami yang selalu tepat waktu berdasarkan waktu yang telah ditentukan dari Kabupaten itu sendiri”.⁷⁹

Pernyataan diatas didukung pula oleh hasil wawancara dengan Bapak Suryanto selaku Sekretaris Desa Surabaya Ilir, yaitu menyatakan bahwasannya :

⁷⁹ Wawancara dengan Bendahara Desa Surabaya Ilir, 13 Mei 2019

“Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Surabaya Ilir disusun oleh pihak desa selaku penanggungjawaban kegiatan yang ada di dalam desa tersebut, kualitas sumber daya yaa suda maksimum oleh aparatur desa sagat memadai untuk menyusun LPJ, tetapi hal tersebut harus dimaksimalkan kedepannya”.⁸⁰

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) ini bahwa seluruh kegiatan harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggung jawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang terjadi di Desa Surabaya Ilir.

Akan tetapi hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Desa Surabaya Ilir tidak melakukan evaluasi kegiatan pembangunan yang berjalan di Desa Surabaya Ilir dengan masyarakat Desa Surabaya Ilir. Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Surabaya ilir, yaitu ibu Lusiana beliau menyatakan bahwasannya :

“yang saya ketahui Pemerintah Desa tidak pernah melakukan Pertanggung Jawaban dihadapan Masyarakat Desa Surabaya Ilir ataupun sosialisasi untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan

⁸⁰ Wawancara dengan sekretaris Desa Surabaya Ilir, 13 Mei 2019

pembangunan untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di Desa Surabaya Ilir ini”.⁸¹

Berdasarkan informasi yang diperoleh berdasarkan penjelasan diatas, walaupun dengan secara Administrasi tahapan Pertanggung Jawabana oleh Pemerintah Desa Surabaya Ilir dapat diselesaikan dengan baik, namun karena LPJ yang dihasilkan adalah hasil karya pihak ketiga dan tidak adanya hasil evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama Masyarakat Desa Surabaya Ilir. Maka tahapan pertanggungjawaban ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Surabaya Ilir dapat dikatakan kurang efektif.

Dalam melaksanakan tugas Pemerintah Desa atau Kepala Desa pada pasal 26 ayat (2), Kepala Desa berperan sebagai :

1. Memimpin menyelenggarakan Pemerintah Desa.
2. Mengangkat dan memberentikan Perangkat Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
4. Menetapkan Peraturan Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Membina kehidupan Masyarakat Desa.
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.

⁸¹ Wawancara dengan Masyarakat Deaa Surabaya Ilir, 13 Mei 2019

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengordinasi pembangunan desa secara partisipatif.
14. Mewakili desa didalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.⁸²

B. Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa (ADD) Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk untuk desa pertahunnya. Dana tersebut di peruntukan dan digunakan untuk desa terkhusus desa Surabaya Ilir yang sedang peneliti teliti. Dimana setiap tahunnya masing-masing desa disetiap provinsi atau kabupaten menerima Alokasi Dana Desa (ADD) hingga mencapai 1 Miliar tiap tahunnya. Dalam penggunaan dana tersebut 30% digunakan untuk operasional sedangkan 70% digunakan untuk pembangunan.

Dana desa dinilai efektif apabila dana tersebut digunakan dengan tujuan adanya kebijakan dana desa itu sendiri. Dana desa tersebut untuk

⁸² Undang-undang tentang Kepala Desa Pasal 26 ayat (2)

mewujudkan pembangunan-pembangunan di Desa yaitu terkait dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1 adalah Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.

1. Transparan yaitu keterbukaan.

Transparan yang dimaksud di Desa Surabaya ilir adalah terkait dengan adanya sumber keuangan desa yang bersumber dari APBD yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) yang di peruntukan untuk pmbangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Surabaya Ilir. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri diatas terkait dengan transparan di Desa Surabaya Ilir yaitu dalam hal Laporan PertanggungJawaban (LPJ) masih sangat kurang efektif dan transparatif.

2. Akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang tidak menentang dua hal tersebut.

Akuntabel di Desa Surabaya Ilir menunjukan terhadap peranan pemerintah desa dalam kegiatan atau kebijakan peraturan pemerintah desa berdasarkan perencanaan pengelolaan ADD, pelaksanaan pengalokasian ADD, serta melakukan pertanggungjawaban dalm pengelolaan ADD. Dalam hal ini pertanggungjawaban dalam ADD di Desa Surabaya Ilir dilakukan oleh Pihak ketiga yang tidak sama sekali terkait dengan Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Surabaya Ilir dapat dikatakan Kurang efektif dimana seharusnya Laporan

PertanggungJawaban tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Surabaya Ilir.

3. Partisipatif yaitu keterlibatan.

Di Desa Surabaya Ilir, masyarakatnya kurang berpartisipasi dalam mendukung pemerintah desa, hal ini tidak sesuai dengan indikator peran pemerintah yang efektif dilihat dari hasil musrembang.⁸³

4. Tertib dan disiplin anggaran

Peran pemerintah Desa Surabaya Ilir kurang tertip dan disiplin anggaran dilihat dari hasil pertanggungjawaban dalm pengelolaan Alokasi Dana Desa, dimana penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan ADD disusun oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari Pemerintah Desa atau lembaga Desa Surabaya Ilir. Dengan adanya tertib dan disiplin anggaran dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Surabaya Ilir dapat dikatakan kurang efektif dikarenakan tidak sesuai atau tidak terserap dengan baik Dana Desa tersebut, tujuan dan realisasi Dana Desa tersebut tidak sesuai yaitu dapat dilihat di Laporan PertanggungJawaban (LPJ).

⁸³ Hasil Wawancara dengan Pemerintah Desa Surabaya Ilir, 13 Mei 2109

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib

Pelaporan :

- a. Menyampaikan laporan realiasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota berupa:
- b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir juli tahun berjalan.
- c. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.
- d. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir tahun anggran kepada bupati/walikota.
- f. Menyampaikan laopran keterangan penyelenggaran pemerintah desa secara tertulis kepada BDP setiap akhir tahun anggaran.

Pertanggungjawaban :

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Kepala Desa atau Pemerintah Desa Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realiasasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

- b. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
- d. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- e. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pembinaan dan Pengawasan.

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan megawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan Retribusi daerah dari Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa.⁸⁴

Peran Pemerintah Desa Surabaya Ilir tersebut peneliti mengatakan kurang efektif karena dana desa tersebut dipergunakan keseluruhannya untuk pembangunan Desa Surabaya Ilir. akan tetapi ditemukan berbagai informasi mengenai dimana untuk mengukur efektivitas Dana Desa tersebut bersumber dari masyarakat sekitar.

⁸⁴ *Sujarweni Wiratna, Akuntansi Desa*, (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, masalah yang ditemukan di Desa Surabaya Ilir tersebut

adalah minimnya pembangunan yang dapat menunjang dan membantu kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan infrastruktur di Desa Surabaya Ilir sangatlah rendah. Misalnya, akses jalannya yang masih sangat banyak sekali belum terkena aspal dan pasar yang saat ini bisa dikatakan hampir mati karena banyak sekali ruko-ruko tidak ada penghuninya kemudian jalanan pasar yang masih tanah biasa dan belum terkena paving sehingga kalau turun hujan pasarpun jadi becek dan kelihatan sangat kumuh. Hal tersebut disampaikan langsung oleh sumber yang di waawncara dengan peneliti.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari APBN kemudian di berika kepada masing-masing kabupaten atau kota yaitu APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemeratan kemampuan keuangan antar desa untuk menandai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang menyalurkan melalui kas.

Adapun Beberapa pendapat dari hasil wawancara mengenai peran Pemerintah Desa dalam Mengalokasikan Dana Desa, dalam kegiatan tersebut sebagai berikut :

“Dalam kegiatan program peran pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat sudah efektif penyampaian tersebut dipaparkan oleh warga masyarakat melalui kepada dusun masing-masing yang ada didesa Surabaya Ilir.”⁸⁵

Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Masyarakat Desa Surabaya Ilir yaitu sebagai berikut :

“ Peranan program yang disampaikan oleh aparat desa kepada masyarakat desa sudah efektif atau sudah jelas, hanya saja sebagian besar masyarakat belum paham tentang program Alokasi Dana Desa yang direalisasikan dan hanya menonton pada pembangunan saja sedangkam dampak pemberdayaan masyarakat terkesan begitu-gitu saja”.⁸⁶

Hal senadapun disampaikan oleh Ibu Nita Tentang Peran Pemerintah Desa Surabaya Ilir dalam menerapkan atau mengalokasikan Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan Desa Surabaya Ilir.

“kami tidak pernah merasakan sosialisasi dari Pemerintah desa Surabaya Ilir dan kami tidak tahu program-program apa saja yang di lakukan pemerintah setempat, jika memang ada pasti hanya bersifat perseorangan karena saya pribadi tidak pernah mendapat informasi.”⁸⁷

Dari penjelasan diatas menunjukan walaupun pada akhirnya Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa (ADD) dapat terealisasikan. Namun karena yang di hasilkan tidak berdasarkan apa-apa

⁸⁵ Wawancara dengan Masyarakat Desa Surabaya Ilir, 12 Mei 2018

⁸⁶ Wawancara dengan Masyarakat Desa Surabaya Ilir, 12 Mei 2019

⁸⁷ Wawancara dengan Masyarakat Desa Surabaya Ilir, 12 Mei 2019

yang menjadi kebutuhan serta kurangnya informasi dari Pemerintah Desa tersebut maka dapat dikatakan pada tahap Peranan Pemerintah Desa dalam Program Alokasi Dana Desa (ADD) masih kurang baik dan efektif.

Sebagaimana pengertian diatas tentang efektivitas Alokasi Dana Desa dapat dikatakan efektif apabila Pemerintah Desa telah menggunakan Dana Desa sesuai dengan Peraturan atau Undang-undang nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa. Dimana efektivitas efektivitas tersebut dapat diukur melalui Indikator Peran Pemerintah Desa yang berperan aktif dalam mengelola keuangan Desa.

C. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Dana Desa prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan hingga ke Desa, melaui-melalui pembanguna infrastruktur yang ada di Desa, memajukan perekonomian di Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Dersa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengalokasian Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan di Desa Surabaya Ilir adalah terkait dengan adanya hasil observasi dan wawancara langsung dengan Pemerintah Desa Surabaya Ilir dimana Pemerintah Desa tersebut sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) di Desa Surabaya Ilir.

Hal tersebut dikatakan dengan Pemerintah Desa Surabaya Ilir maupun Masyarakat Desa Surabaya Ilir mengemukakan berbagai Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat yang dihadapi Pemerintah Desa dalam Pengalokasian Dana Desa (ADD) Surabaya Ilir dalam meningkatkan pembangunan di Desa Surabaya Ilir adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Diantara faktor pendukung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah adalah :

a. Kepala Desa atau Pemerintah Desa.

Faktor pendukung yang pertama adalah Kepala Desa atau Pemerintah Desa Surabaya Ilir, dimana Pemerintah Desa tersebut sangatlah penting dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), tanpa adanya Pemerintah Desa atau biasa yang disebut di Desa Surabaya Ilir adalah kepala kampung maka dari itu peran kepala kampung sangatlah menjadi faktor pendukung dalam mengelola keuangan Desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD).

b. Perangkat Desa.

Faktor pendukung yang kedua adalah perangkat Desa tanpa adanya perangkat desa tidak akan terjalannya suatu pemerintahan yang ada di Desa Surabaya Ilir, Peran Perangkat Desa sangatlah membantu Kepala kampung untuk mengelola Keuangan yang ada di Desa Surabaya Ilir.

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah baik yang berkaitan dengan jumlah maupun dengan kemampuan Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang di peroleh dari APBdesa.

Hasil wawancara dengan Bapak Usman sebagai Kepala Desa Surabaya Ilir.

“Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat rendat di Pemerintah Desa Surabaya Ilir yang sangat ber[engaruh kepadaperencanaan sehingga di perlukan peningkatkan setiap tahunnya, khususnya aparatur Pemerintah Desa sehingga kami berinisiatif melakukan pelatihan kepada masing-masing bidang yang ada di perangkat Pemerintah Desa guna meningkatkan serta menunjang Sumber Daya Manusia”.⁸⁸

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan di Desa Surabaya Ilir ini yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksanaan Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa Surabaya Ilir masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki Perangkat Pemerintah Desa Surabaya Ilir.

⁸⁸ Wawancara dengan Pemerintah Desa, 13 Mei 2019

Hal tersebut terbukti dengan adanya ketidakmampuan pelaksanaan kegiatan dalam mengelola Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang bukan dari tim pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga bukan bagian dari Perangkat Pemerintah Desa Surabaya Ilir.

b. Informasi

Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa yang terkait dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) memang masih kurang jelas. Selain memang tidak pernah melakukan sosialisais sebelumnya terhadap Masyarakat Desa Surabaya Ilir, dalam tahapan musrembang Pemerintah Desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal Alokasi dana Desa yang di peroleh Desa Surabaya Ilir, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan adanya Pengalokasian Dana Desa (ADD), misalnya dalam menggunakan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahap menggunakan Pengalokasian Dana Desa (ADD) tersebut.

Selain itu juga, Pengalokasian Dana Desa (ADD) tersebut dilakukan melalui proses sosialisasi. Informasi yang di peroleh melaui sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah Desa Surabaya Ilir dalam proses Pengalokasian Dana Desa (ADD) beluk cukup baik. Dimana dari hasil observasi dan wawancaea, semuanya sependapat bahwasannya sosialisasi Pengalokasian Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Subayara Kabupaten Lampung Tengah hanya sampai pada Pemerintah Desa selaku objke pelaksanaan Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan

kepada masyarakat Desa Surabaya Ilir tidak ada pelaksanaan sosialisasi dari Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten. Berikut pernyataan yang disampaikan dengan salah satu anggota Masyarakat Desa Surabaya Ilir, yaitu Bapak Romli yang mengatakan bahwasannya :

“Tidak pernah adanya sosialisasi terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebelumnya, jika memang ada pastinya hanya bersifat perorangan karena saya pribadi tidak pernah mendapatkan informasi pada saat ,musrembang diadakan oleh Pemerintah Desa itu hanya jumlah anggaran yang disebutkan, bukan terkait dengan penggunaan anggaran itu tidak dijelaskan”.⁸⁹

Pendapat lain juga di katangan oleh salah satu masyarakat Desa Surabaya Ilir yang dimana kurangnya informasi terkait dengan adanya Pihak Pemerintah Desa dalam menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD).

“kami selaku masyarakat Desa tidak mengetahui sama sekali adanya Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terkait dengan adanya tugas dan tanggungjawab kami dalam setiap adanya pembangunan yang akan di laksanakan di Desa Surabaya Ilir dan kamipun tidak pernah mendapatka informasi mengenai setiap menggunakan anggaran ataupun kegiatan yang dilakukan di Desa Suabaya Ilir tersebut”.⁹⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwasannya kurangnya informasi yang di peroleh masyarakat Desa Surabaya Ilir dari Pemertintah

⁸⁹ Wawancara dengan Masyarakat Desa, 14 Mei 2019

⁹⁰ Wawancara dengan Mayrakat Desa, 14 Mei 2019

Desa, maupun dari Pemerintah Kecamatan ataupun sekaligus dari Pemerintah Kabupaten.

c. Partisipasi Masyarakat

Peranan partisipatif masyarakat Desa terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak pernah terlepas dari keterlibatan Masyarakat Desa Surabaya Ilir yang dimana masyarakat merupakan bagian dari anggota Pemerintah Desa Surabaya Ilir, maka dari itu, sebagai Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Kampung atau Desa Surabaya Ilir beserta jajaran atau aparatur Desa perlu menyadari bahwasannya dalam Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan keuangan di Desa Surabaya ilir tersebut dapat dialokasikan sesuai yang di rencanakan Pemerintah Desa Surabaya ilir.

Namun yang terjadi di Desa Surabaya Ilir tersebut tidak adanya partisipasi dari Masyarakat Desa Surabaya Ilir dalam Mengalokasikan Dana Desa (ADD), hal ini ditunjukan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir pada saat musrembang maupun disaat menyampaikan aspirasi atau pendapat terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Desa Surabaya Ilir :

“partisipasi masyarakat di Desa Surabaya Ilir dalam hah pembangunan masih sangat rendah dan kurangnya kepekaan pada masyarakat itu sendiri, kepedulian terhadap kegiatan sangat rendah”.⁹¹

⁹¹ Wawancara dengan masyarakat Desa, 14 Mei 2109

Hasil wawancara diatas juga senada dengan yang disampaikan Bapak Suryanto sebagai Sekretaris Desa Surabaya Ilir yang menyatakan bahwasannya :

“ Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Namun setiap tahapan dilaksanakan partisipasi Masyarakat Desa Surabaya Ilir tersebut masih kurang”.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam Pengalokasian Dana Desa (ADD) Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ini yaitu dari partisipasi Masyarakat dalam proses Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa Surabaya Ilir masih tergolong sangat rendah, terbukti dengan adanya tahapan dari setiap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

D. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa (ADD) Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Persepektif Ekonomi Islam

Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi islam, eksistensi peran pemerintah dalam sistem ekonomi islam bukan semata-mata karena adanya kegagalan pasar dan ketidaksempurnaan pasar. Pada dasarnya peranan pemerintah merupakan derivasi dari konsep kekhilafahan dan konsekuensinya adanya keajiban-kewajiban kolektif (fard al-khifayah) untuk merealisasikan falah. Pemerintah adalah pemegang

⁹² Wawancara dengan Sekretaris Desa Surabaya Ilir, 14 Mei 2019

amanah dari Allah SWT dan Rosul-Nya serta amanah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat. Secara umum peranan pemerintah akan berkaitan dengan upaya perwujudan tujuan ekonomi islam secara keseluruhan.

Disamping tugas yang berkaitan dengan peran pemerintah memiliki tanggungjawab yang luas sehubungan dengan upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan tanggungjawab ini pada dasarnya mencakup berbagai tugas luas yang bersifat kontekstual, sepanjang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kolektif dalam penerapan ajaran Islam. Akan tetapi beberapa tugas pokok pemerintah antara lain :

- a. Manajemen terpenuhnya kebutuhan dasar bagi masyarakat.
- b. Pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan.
- c. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi.
- d. Mengambil berbagai kebijakan ekonomi dan non ekonomi yang relevan bagi perwujudan faham masyarakat.⁹³

Dalam ajaran Islam pemenuhan kebutuhan dasar serta pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan bukan hanya tugas individual masyarakat, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif seluruh masyarakat, setiap individu harus memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya, dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan ini, sebab negara dibentuk memang untuk mengemban berbagai

⁹³ P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia *Ekonomi Islam*, (Jakarta pers 2013) h. 84

tugas kolektif. Negara memiliki perangkat dan sumberdaya termasuk keuangan untuk memberikan jaminan ini.⁹⁴

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk desa pertahunnya. Dana tersebut di peruntukan dan digunakan untuk desa terkhusus desa Surabaya Ilir yang sedang peneliti teliti. Dimana setiap tahunnya masing-masing desa disetiap provinsi atau kabupaten menerima Alokasi Dana Desa (ADD) hingga mencapai 1 Miliar tiap tahunnya. Dalam penggunaan dana tersebut 30% digunakan untuk operasional sedangkan 70% digunakan untuk pembangunan.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari APBN kemudian di berikan kepada masing-masing kabupaten atau kota yaitu APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemeratan kemampuan keuangan antar desa untuk menandai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang menyalurkan melalui kas.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara urusan terkecil di Desa yang dimana kedudukannya langsung dibawah Kecamatan yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Pemerintah Desa mempunyai tugas yang dimana tugasnya tersebut diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, begitu pula dalam persepektif Ekonomi Islam, Pemerintah Desa

⁹⁴ *Ibid* h.85

mempunyai tugas sebagai pemegang amanat sebagai kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah serta Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Otonomi Desa yang seluas-luasnya dalam rumah tangganya sendiri, demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga masyarakat Desa Surabaya ilir. Pemerintah Desa mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁹⁵

Berdasarkan Qur'an Surat An-nisa ayat 58 yang menyebutkan bahwasannya Allah telah menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, artinya yang berhak menerima kekuasaan atas dasar Pemerintah Desa yaitu haruslah adil dalam menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Surabaya Ilir.

Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter. Aspek politik dari kebijakan

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S : An-Nisa ayat 58*. (Bandung CV Penerbit Diponegoro, 2015)

fiskal yang dilakukan oleh khalifah adalah dalam rangka mengurus dan melayani umat. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan haruslah mengikutsertakan semangat tauhid didalam sistem itu, agar semakin terdorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kemajuan ekonomi.⁹⁶ Dilihat dari bagaimana Islam memecahkan problematika ekonomi, maka berdasarkan kajian fakta permasalahan ekonomi secara mendalam terungkap bahwa hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil.⁹⁷ Allah SWT mengingatkan kita bahwa pentingnya fungsi Pemerintah dalam mengelola Pemberian Allah. Hal ini terdapat dalam Qur'an Surat Al-An'am:165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya : “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-An'am:165)⁹⁸

⁹⁶ Eko Suprayitno, *EKONOMI ISLAM : Pendekatan Ekonomi MakroIslam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.16.

⁹⁷ Mustafa edwin Basution, et. Al. *Pengenalan Eksklusif: EKONOMI ISLAM* (Depok: KENCANA,2017), h.204

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S Al-An'am ayat 165 (Bandung CV Penerbit Diponegoro,2015)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah mengangkat manusia sebagai Pemimpin dalam pengelolaan dimuka bumi, Allah mengangkat derajat manusia tidaklah sama antara satu dengan yang lainnya, ada yang ditinggikan dan ada pula yang direndahkan. Tujuannya adalah sebagai pengelola dimuka bumi untuk melakukan penataan yang adil bagi masyarakat di bumi atas segala pemberian Allah SWT.

Berdasarkan hasil observasi bahwasannya Pemerintah Desa Surabaya Ilir kurang adil dalam penataan keuangan Dana Desa, karena Pemerintah Desa adalah Pemimpin tertinggi yang ada di Desa-desa oleh karena itu bersikap adil dalam mengelola keuangan adalah cerminan Pemerintah Desa yang adil berdasarkan Q.S Al An'am ayat 165.

Dalam ajaran Islam telah banyak di jelaskan tentang pentingnya menjadi Pemerintah Desa yang baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan akhirat yang dimana hal ini adanya pendapat bahwa islam adalah agama yang Komprehensif, sistem sosial dan sebagiannya.

Dalam Perekonomian yang islami, Peranan Pemerintah pada dasarnya mempunyai rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam Peran Pemerintah didasari denganya adanya beberapa argumentasi, hal tersebut yaitu yang di kemukakan oleh Ulil Amri. Ulil Amri adalah seseorang atau sekelompok yang mengurus kepentingan-kepentingan umat.

Dalam dasar Ekonomi Islam, menjalankan Peran Pemerintah haruslah menjunjung tinggi prinsip Musyawarah (syura) sebagai salah satu

mekanisme dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat.

Secara Umum, ruang lingkup Peranan Pemerintah Desa diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

- a. Upaya mewujudkan tujuan Ekonomi Islam secara Keseluruhan.
- b. Upaya mewujudkan konsep dasar yang Islami.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Penelitian yang telah peneliti bahas pada bab sebelumnya mengenai efektivitas peran pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa di desa Surabaya Ilir, kabupaten Lampung Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Desa dalam menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dimana dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ada tiga tahap, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan PertanggungJawaban.
2. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pembangunan di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dapat di lihat dari Musrembang yang diadakan Tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih sangat kurang efektif dalam hal Transparasi Dana Desa, Akuntabel atau PertanggungJawaban dalam melakukan Laporan PertanggungJawaban (LPJ), dan Partisipatif Masyarakat Desa yang kurang serta tertib dan disimplimn Anggaran.
3. Faktor-faktor pendukung Peran Pemerintah Desa dalam Mengalokasikan Dana Desa (ADD) yaitu adanya Pemerintah Desa Surabaya Ilir serta

jajaran atau aparaturnya Desa Surabaya Ilir, sedangkan faktor penghambat yaitu SDM, informasi serta Partisipasi Masyarakat Desa Surabaya Ilir.

4. Peran Pemerintah mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta mempunyai fungsi dalam mengelola pemberian Allah Swt.

Hal ini terdapat dalam Q.S Al-An'am:165 yang artinya dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya tuhanmu Maha Cepat Siksaan-Nya dan dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Pemerintah Desa dalam proses Pengelolaan Dana Desa (ADD) dimulai dari tahapan perencanaan dalam melakukan kegiatan Musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa kepada masyarakat. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlunya aparaturnya Pemerintah Desa Surabaya Ilir melakukan transparansi menggunakan Anggaran ADD agar seluruh Masyarakat Mengetahui Pengalokasian Dana Desa (ADD) yang sesuai serta yang diharapkan. Selanjutnya pertanggungjawaban harus dilakukan oleh aparat

Pemerintah Desa Surabaya Ilir dan perlu evaluasi masyarakat dalam setiap proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Sebagai Pemerintah Desa Surabaya Ilir perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap Tim Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian perlu adanya transparansi informasi yang di sampaikan kepada masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) sehingga dapat meningkatkan Partisipasi Masyarakat mencapai tujuan dari Alokasi dana Desa (ADD).
3. Sebagai Pemerintah Desa Surabaya Ilir, harusnya memahami faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam mengalokasikan Dana Desa.
4. Sebagai Pemerintah Desa Surabaya Ilir, haruslah menjadi penguasa yang adil serta menjalankan amanat yang telah diberikan Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Murni Siswanti, *“Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”*, Riau, 2012.

H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonom yag Asli, Bulat, dan Utuh*, jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.

Kementrian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta : Kemenkeu, 2017.

Kementrian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta : Kemenkeu, 2017.

Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2016.

Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* Edisi 4, Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama,2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatifdan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016.

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.

Tabrani Rusyan, *Membangun efektivitas kinerja kepala desa*, (Jakarta: bumi aksara,2018)

Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)

Jurnal dan lainnya

Abu Rahum, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”, (eJournal Ilmu Pemerintahan : 3 (4) 1623-1636 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2015.

Danu Wisakti, Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grogoban, Magister Ilmu Administrasi , UNDIP, 2008.

Undang-undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri, tentang pengelolaan keuangan desa, Nomor 13 Tahun 2014.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Pasal 81 Dan 82), Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014.

Wawancara dengan Kepala Desa dan Masyarakat Desa Surabaya Ilir

Al-qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S : Al-Isra' (17) ayat 26*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2015.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S : An-Nisa (04)*
ayat 58, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2015